



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Mei 2025

Halaman: 2

MENUJU 100 PERUBAHAN, TAK KHAWATIR POTENSI PAD BERKURANG

Buktikan Komitmen, Hasto Pimpin Penertiban Reklame Ilegal

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Hasto Wardoyo membuktikan komitmennya dalam melakukan penataan di Kota Yogya. Pada Selasa (13/5) pagi kemarin dirinya bahkan memimpin penertiban reklame ilegal yang berada di sisi timur Embung Langensari Gondokusuman.

Menurutnya, dalam retreat kepala daerah di Magelang akhir Februari 2025 lalu Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar setiap kota merapikan diri. Salah satunya terhadap sampah visual. "Baliho-baliho diperkotaan banyak dikritisi oleh Presiden karena menjadi sampah visual. Bahkan foto kepala daerah yang banyak terpasang di baliho itu diturunkan saja kalau tidak penting," tandasnya di sela penertiban reklame ilegal.

Oleh karena itu demi menuju 100 perubahan dalam 100 hari kerjanya, Hasto memerintahkan Sat Pol PP agar tidak pandang bulu dalam menertibkan reklame ilegal. Terutama terhadap keberadaan reklame yang

secara jelas tidak akan mengantongi ijin karena berada di area terlarang. Seperti halnya reklame berukuran besar yang berada di sisi timur Embung Langensari. Reklame tersebut berdiri di atas taman milik Pemkot Yogya sehingga melanggar Perda 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Bangunan reklame yang dikelola oleh pihak swasta itu lantas ditutup dengan kain hitam bertuliskan 'Reklame Ini Tidak Berizin'. Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat bahkan melakukan penutupan papan reklame secara langsung menggunakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKPP) Kota Yogya.

"Secara bertahap reklame-reklame seperti ini akan kami tertibkan betul. Ini sudah menjadi sampah visual. Apalagi kalau sampai tidak mengurus ijin dan tidak membayar pajak. Secara regulasi dan estetika jelas tidak memenuhi," tandas Hasto.

Dari pendataan awal terdapat 40 titik reklame berukuran besar yang dikategorikan ilegal. Hasto bahkan tidak khawatir jika harus kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame. Jika setiap titik reklame itu potensinya Rp 150 juta per tahun yang bakal masuk sebagai kas daerah, maka potensi pajak reklame yang hilang di tahun ini bisa mencapai Rp 6 miliar. "Saya

belum hitung secara pasti berapa potensi pajak yang hilang dari reklame ini. Tetapi harus diingat bahwa estetika itu juga sangat penting karena Yogya merupakan daerah tujuan wisata," tambahnya.

Sementara Octo Noor Arafat, menilai dari total 40 titik reklame yang harus di-tertibkan sebanyak 13 titik di antaranya sudah dilakukan pemberhentian fungsi dengan penutupan kain hitam. Kemudian tiga titik lainnya bahkan sudah dibongkar secara mandiri karena dipastikan tidak akan mengantongi ijin. Sisanya masih dalam proses pemberhentian fungsi. Setelah pemberhentian fungsi diberlakukan, pengelola masih memiliki waktu untuk menyesuaikan prosedur. Setelah batas waktu yang diberikan tidak bisa dipatuhi, lantas dilanjutkan peringatan untuk pembongkaran dalam tujuh hari



KR: Ardi Wahdan

Pemberhentian fungsi reklame ilegal di sisi timur Embung Langensari berupa penutupan kain hitam oleh Kepala Sat Pol PP Kota Yogya.

kerja.

Akan tetapi jika pengelola tidak juga membongkar secara mandiri, maka Sat Pol PP yang akan membongkar secara paksa. Alokasi anggaran untuk pembongkaran paksa reklame maupun jenis penegakan perda lainnya di tahun ini mencapai Rp 500 juta.

"Ketika itu kami bongkar,

maka asetnya menjadi milik Pemkot Yogya. Tahun 2024 lalu kami serahkan aset hasil penegakan perda seperti reklame, fiber optik, gerobak PKL yang ditinggalkan dan lainnya dengan total nilai Rp 150 juta," tandasnya.

Octo pun mengaku, jumlah reklame yang melanggar aturan dan harus ditertib-

kan berpotensi bertambah. Hal ini karena mengacu Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2024 terkait Sumbu Filosofis, termaktub larangan jenis reklame di kawasan tersebut. Hanya pihaknya masih harus melakukan diskusi terkait area sunbu filosofis mana saja yang tidak diperbolehkan untuk reklame. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005